

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Fenomena globalisasi yang melahirkan isu mengenai seksualitas dan gender di tengah masyarakat telah menjadi sebuah isu yang kompleks di Thailand. Terlihat dari berkembangnya homophobia di masyarakat Thailand. Hal ini menyebabkan tingginya angka diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kaum LGBT yang cukup banyak di Thailand. Kaum LGBT ini termarginalkan dari setiap segi kehidupan baik sosial, politik, maupun ekonomi. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh perubahan sistem politik pemerintahan Thailand yaitu, Monarki Konstitusional. Sistem pemerintahan ini cenderung dipegang oleh militer yang menghendaki segala sesuatunya harus bersifat 'normal' untuk mendorong modernitas Thailand. Dalam kaitannya dengan seksualitas dan gender perilaku homoseksual tentunya merupakan sesuatu yang abnormal, sehingga kaum LGBT dengan perilakunya dianggap sesuatu yang menyimpang oleh masyarakat yang berdampak pada terbentuknya persepsi masyarakat yang tidak toleransi terhadap kaum LGBT. Padahal bila ditarik kebelakang melalui sejarah Thailand, ajaran Budha dalam kitab Vinayapitaka memiliki kepercayaan bahwa Sang Budha menciptakan manusia bukan hanya pria dan wanita, tetapi juga hermaphrodit (bisa berwujud pria atau wanita). Berdasarkan hal tersebut, para *non-governmental organizations* (NGOs) di Thailand memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi kepada kaum LGBT. Mereka membangun sebuah jaringan advokasi yang sifatnya transnasional dengan tujuan memperjuangkan isu hak asasi manusia terhadap kaum LGBT agar mendapatkan keadilan dan pengakuan oleh pemerintah maupun masyarakat di Thailand.

Temuan dalam kajian ini telah menjawab pertanyaan penelitian yang dimiliki oleh penulis mengenai mengapa *transnational advocacy networks* dalam isu LGBT Rights di Thailand dapat mendorong legalitas LGBT sehingga diterima oleh

masyarakat. Dengan menggunakan empat poin dalam konsep boomerang pattern yang dikemukakan oleh Keck & Sikkink yaitu, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, penulis menganalisa keberhasilan upaya yang dilakukan oleh jaringan advokasi tersebut. Pertama *information politics*, para NGO dalam jaringan advokasi tersebut seperti *Anjaree Foundation*, *Rainbow Sky*, dan *Purple Sky* melakukan cara untuk menghasilkan informasi dan menyebarkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Mereka berusaha menarik perhatian dari masyarakat terhadap isu yang mereka bawa, adapun caranya seperti kampanye maupun terjun langsung memberikan informasi kepada masyarakat melalui penyebaran brosur. Kedua *symbolic politics*, jaringan advokasi Thailand ini melakukan beragam aksi dengan menggunakan tanda atau simbol kaum LGBT yang bertujuan untuk menghimpun dukungan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh *Rainbow Sky* dalam aksi pemboikotan sebuah hotel di Thailand yang berperilaku diskriminatif terhadap kaum LGBT, tidak hanya itu saja aksi *gay parade* juga salah satu cara *symbolic politics* yang dilakukan. Selanjutnya *leverage politics*, jaringan advokasi ini menarik aktor yang lebih kuat seperti UNDP, ILO, dan ILGA untuk semakin menekan pemerintah Thailand dalam kebijakan legalitas kaum LGBT. Keempat *accountability politics*, setelah adanya legalitas LGBT jaringan advokasi ini terus memantau komitmen dari pemerintah Thailand.

Untuk semakin memperjelas bagaimana penerimaan legalitas LGBT *Rights* di tengah masyarakat Thailand, penulis juga menggunakan konsep *domestic cultural values* dari Cortell & Davis yang memberikan penjelasan tentang peran nilai dan norma. Kebijakan legalitas LGBT *Rights* yang didorong oleh jaringan advokasi di Thailand dapat diterima oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh nilai dan norma dalam masyarakat. Ajaran Budha yang berisi mengenai kepercayaan penciptaan manusia dan perilaku homoseksual mulai muncul kembali setelah sebelumnya sempat terepresi. Ajaran Budha ini kongruen dengan kebijakan legalitas LGBT *Rights* tersebut, sehingga masyarakat perlahan menerima kebijakan tersebut karena ketika adanya

keselarasan dengan nilai dan norma dalam masyarakat secara otomatis masyarakat akan mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, sejarah kerajaan di Thailand dengan silsilah para raja yang memiliki perilaku homoseksual tersebut juga semakin mendukung penerimaan masyarakat Thailand. Adanya kongruensi atau keselarasan tersebut, telah menyebabkan perkembangan gender di Thailand yang terdiri dari delapan belas jenis gender. Penerimaan masyarakat Thailand ini juga dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang menggunakan kaum LGBT sebagai obyek tujuan wisata terutama dalam *entertainment tourism*.

Berkaitan dengan studi ilmu hubungan internasional, penelitian ini menyumbang daftar kajian pada topik hak asasi manusia melalui pembahasan mengenai perjuangan keberhasilan jaringan advokasi transnasional di Thailand dalam isu LGBT *Rights*. Penulis telah menunjukkan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh jaringan advokasi yang sifatnya transnasional di Thailand untuk mendorong legalitas LGBT dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Keck & Sikkink. Penulis juga telah menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan legalitas LGBT yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand melalui konsep *domestic cultural values* milik Cortell dan Davis. Penelitian ini berangkat dari isu mengenai homophobia yang terjadi di Thailand, dimana belum ada penelitian yang membahas sebelumnya mengenai homophobia di Thailand melalui kedua teori yang digunakan oleh penulis. Kebanyakan studi-studi sebelumnya menggunakan pendekatan *Queer Theory* untuk memahami banyaknya gender di Thailand. Namun demikian, isu gender dalam bingkai hak asasi manusia tersebut merupakan isu yang bersifat dinamis dan akan terus mengalami perkembangan terutama kehidupan kaum LGBT ke depannya. Sehingga, agenda penelitian yang dapat dilakukan adalah mengenai peningkatan kehidupan kaum LGBT dalam berbagai sektor baik sosial, ekonomi, maupun politik.